

## BAB V

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. HASIL PENELITIAN

Desa Penggalangan terpilih menjadi perwakilan pelaksanaan program Keluarga Berencana yang di canangkan oleh pemerintah di Kecamatan Tebing Syahbandar, dengan melihat adanya laju pertumbuhan yang cukup tinggi terhitung dari rentang tahun 2010-2019 di Desa Penggalangan yaitu sebesar 2,63% memiliki Luas wilayah 13,15 km<sup>2</sup> dengan kepadatan penduduk tertinggi di banding desa yang lain yaitu 572,70 km<sup>2</sup> atau sebesar 22,74% dari keseluruhan wilayah (BPS,2020).

Setelah diadakan penelitian dan pengumpulan data di lapangan, baik melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dengan informan, maka peneliti memperoleh data dan informasi mengenai Implementasi Program Keluarga Berencana di Kampung Kb di Desa Penggalangan Kecamatan Tebing Syahbandar, Maka diperoleh hasil penelitian menurut Teori Goerge C. Edward III yang ditinjau dari sumber daya, disposisi, komunikasi dan struktur birokrasi.

**Tabel 11. Hasil Analisis Implementasi Program Keluarga Berencana Berdasarkan Teori Goerge C. Edward III**

No	Variabel	Kesesuain		Keterangan
		Sesuai	Tidak sesuai	
1	Sumber Daya :			
	1) Staf			
	a. Jumlah staf	✓	-	Hasil penelitian bahwa staf yang memberikan pelayanan kepada masyarakat sudah cukup memadai dilihat dari saat sosialisasi petugas lengkap dan adanya struktur organisasi kampung KB. dilihat dari tidak adanya anggota yang merangkap dua
	b. kemampuan para staf	✓	-	Para staf memiliki kemampuan yang baik, terlihat dari tidak adanya permasalahan atau kesulitan dalam penyampaian program di lapangan
	c. Kapabilitas staf	-	✓	latar belakang staf/kader belum mumpuni berdasarkan kapabilitasnya, terlihat masih di dapati beberapa staf/kader yang memilki latar belakang Pendidikan SMP.
	2) Informasi			
	a. Pelaksanaan kebijakan	✓	-	Tiap staf/kader menjalankan kebijakan dengan baik dan sesuai instruksi yang di perintahkan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 80 responden (86%) telah menjawab informasi lengkap tentang jenis-jenis KB, manfaat KB, reaksi/ efek dari jenis Kb dan yang tidak lengkap sebanyak 13 responden (14%).
	b. Kepatuhan	✓	-	Keprofesionalan tiap staf dan kepatuhan dalam menjalankan tugas dinilai sudah cukup baik namun beberapa hal seperti keterlambatan dalam memulai untuk menjalankan tugas atau mendatangi rapat di rasa perlu di jadikan bahan evaluasi

				untuk perbaikan.
3) Wewenang	a. Legitimasi implementor	✓	-	Struktur kepengurusan jelas dan terimplementasikan sesuai dengan legitimasinya.
	b. Efektivitas formal	✓	-	hirarki kepemimpinan sudah berjalan semestinya, jabatan yang di emban disesuaikan dengan tugas.
4) Fasilitas	a. Fasilitas fisik	✓	-	Ketersediaan fasilitas fisik berupa bangunan/kantor sebab ketersediaan ruang di balai desa sudah mencukupi untuk dijadikan sebagai tempat titik kumpul pelaksanaan program. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 93 responden (100%) menyatakan pemberian obat atau alat tersedia secara gratis namun ada biaya admin sekitar 20.000- 25000. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 42 responden(42%) telah mendapatkan sosialisasi KB dan yang belum mendapatkan sosialisasi adalah sebanyak 54 responden (58%).hanya sesekali dantidak terjadwal dilakukana n pelatihan/sharing session bagi para anggota pelaksana guna menambah wawasan keilmuan.
	b. Fasilitas non fisik			
2) Disposisi	1) Pengangkatan birokrasi	✓	-	Adanya subjektivitas dalam pemilihan/pengangkatan beberapa kader dinilai kurang baik karena akan di dapati ketidak relevan kemampuan sumber daya dengan posisi yang di emban.
	2) Pelayanan	✓	-	sikap petugas KB dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 72 responden (77%) sudah dilayani dengan baik dan yang tidak dilayani dengan baik sebanyak 21 responden ( 23%).
	3) Insentif			Tidak adanya reward/Intensifikasi kepada para staf memungkinkan staf untuk tidak begitu termotivasi dalam

		✓	-	menjalankan tugasnya. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 93 responden (100%) tidak ada mendapatkan bantuan dana.
3	Komunikasi			
	1) Transmisi	✓	-	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 85 responden (91%) mudah memahami informasi dan sulit memahami sebanyak 9 responden (9%).
	2) Kejelasan	✓	-	struksi dan informasi tugas sudah cukup jelas. Kejelasan informasi berkaitan dengankedetailan/kerincian informasi cukup jelas. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 85 responden (91 %) sudah dilayani dengan baik dan yang tidak dilayani dengan baik sebanyak 9 responden (9%).
	3) konsistensi	-	✓	didapati beberapakali keterlambatan dalam penginformasian dalam transmisi komunikasi mengindikasi kurang baiknya penyaluraninformasi dari pihak birokrasi. Tidak adanya konsistensi menyebabkan beberapa kali instruksi dengan kebijakan bertimpangan.
4	Struktur Birokrasi			
	1) Mekanisme pelaksanaan SOP	✓	-	SOP dilakukan sesuai dengan pedoman buku petunjuk teknis program KB, Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 49 responden (53 %) adanya kunjungan yang rutin dilakukan dan tidak rutin sebanyak 44 responden (47%).
	2) Kepahaman pelaksana terhadap SOP	-	✓	Tidak semua anggota sepenuhnya memahami tentang SOP yang berlaku, hanya sekedar tau.
Jumlah		13	3	Sub indikator yang terpenuhi :13 indikator dan yang tidak terpenuhi:3
Persentase (%)		81,25%	18,75%	

Tabel 10. Menunjukkan bahwa indikator yang terpenuhi sebanyak 13 indikator dan yang tidak terpenuhi sebanyak 3 indikator, dengan demikian persentase :  $\frac{13}{16} \times 100 = 81,25\%$ . tergolong baik, namun masih ada beberapa indikator yang belum terpenuhi untuk tiga aspek. Untuk aspek sumber daya yaitu kapabilitas staf, aspek komunikasi menyangkut konsistensi dan aspek struktur birokrasi tentang pemahaman pelaksana terhadap SOP, hanya satu aspek yang terpenuhi yaitu aspek disposisi.

## **B. PEMBAHASAN**

### **Analisis Hasil Implementasi Program Keluarga Berencana di Kampung KB Desa Penggalangan Kecamatan Tebing Syahbandar.**

#### **1. Sumber Daya**

Pada indikator sumber daya dalam implementasi program Keluarga Berencana di kampung KB Desa Penggalangan belum dapat dikatakan baik. Adapun sub indikator yang dapat dilihat adalah :

- 1). Staf dinilai sudah mencukupi, dapat terlihat dari data fisik berupa struktur organisasi kepengurusan yang terlihat tiap posisi di isi oleh anggota yang berbeda tidak ada di dapati satu orang merangkap dua jabatan sekaligus, tapi untuk kapabilitas staf masih di dapati beberapa kader yang berlatar belakang pendidikan hanya SMP sederajat. Pelaksana kebijakan seharusnya memiliki latar belakang Pendidikan tamatan minimal SMA sederajat, Hal ini sejalan dengan teori Hidayat dalam Manurung (2013) bahwa pendidikan merupakan penuntun manusia dalam kehidupan untuk memperoleh informasi sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang

dimiliki akan lebih mudah dalam menyampaikan informasi. Hal ini sejalan dengan teori Juliani (2012) yaitu pelatihan sangat penting untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja staf.

- 2). Informasi, a). Cara pelaksanaan kebijakan, Tiap staf/kader menjalankan kebijakan dengan baik dan sesuai instruksi yang di perintahkan. Dalam penelitian bahwa sebanyak 80 responden (86%) telah menjawab informasi lengkap tentang jenis- jenis KB, manfaat KB, reaksi/ efek dari jenis K<sub>b</sub> dan yang tidak lengkap sebanyak 13 responden ( 14%). ini sejalan dengan kepatuhan dalam pelaksanaan peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan, Keprofesionalan tiap staf dan kepatuhan dalam menjalankan tugas dinilai sudah cukup baik namun beberapa hal seperti keterlambatan dalam memulai untuk menjalankan tugas atau mendatangi rapat di rasa perlu di jadikan bahan evaluasi untuk perbaikan.
- 3). Wewenang, a) Legitimasi para implementor, Struktur kepengurusan jelas dan terimplementasikan sesuai dengan legitimasinya. b) Efektivitas kewenangan formal, Hirarki kepemimpinan sudah berjalan semestinya, jabatan yang di emban disesuaikan dengan tugas.
- 4). Fasilitas, Fasilitas adalah infrastruktur ataupun alat yang mendukung implemetasi kebijakan/program ada 2 yaitu fasilitas fisik (dana/barang). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 93 responden (100%) menyatakan pemberian obat atau alat tersedia secara gratis namun ada biaya admin sekitar 20.000- 25000. Hal ini sesuai sejalan dengan teori Edward III (Agustino, 2008) bahwa sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya

manusia, yakni kompetisi implementor, dan sumber daya financial.

Sumberdaya merupakan faktor penting untuk pelaksanaan program agar efektif, walaupun kebijakan telah dikomunikasikan tanpa sumberdaya maka program atau kebijakan hanya sekedar kertas dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 42 responden (42%) telah mendapatkan sosialisasi KB dan yang belum mendapatkan sosialisasi adalah sebanyak 54 responden (58%).

Para pelaksana harus diberdayakan supaya kemampuannya meningkat dalam melayani masyarakat. Sumberdaya lainnya yang perlu diperhatikan juga adalah sumber daya keuangan. Karena apabila di dalam suatu pelaksanaan program anggarannya tidak mencukupi maka akan menjadi persoalan yang pelik untuk merealisasikan apa yang akan dituju dalam suatu program tersebut walaupun manusianya memiliki kompetensi, hal ini sesuai dengan penelitian (Januar Iqbal, 2011) implementasi program Keluarga Berencana dengan hasil sumberdaya manusia yang kurang, dengan anggaran dana yang cukup, para pelaksana kebijakan kewalahan dalam melaksanakan kebijakan sehingga berdampak pada proses pelaksanaan program seperti sosialisasi kemasyarakatan sehingga masyarakat kurang informasi. Saat sumber daya manusia tercukupi tetapi sumber finansial tidak tercukupi ataupun sebaliknya maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan implementasi suatu program.

## **2. Disposisi**

Pada indikator disposisi dalam implementasi program Keluarga Berencana



di kampung KB Desa Penggalangan dapat dikatakan sudah baik dalam pelaksanaannya. Terdapat dua sub indikator yaitu, pengangkatan birokrasi dan insentif.

1. Pengangkatan Birokrasi, dilihat dari stuktur organisasi acuan dasar bagi pelaksana mengenai pembagian tugas dan kewenangan yang dimilikinya. Apabila ada bagian di dalam struktur organisasi yang melanggar, maka akan diberikan peringatan terlebih dahulu sebelum kemudian dijatuhkan sanksi atau hukuman, ini dilakukan untuk menjaga konsistensi dalam bekerja dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sesuai keputusan Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Struktur organisasi dibentuk berdasarkan kebutuhan dari setiap lembaga dimana setiap lembaga mempunyai peranan yang berbeda-beda didalam kegiatan pemerintahan, sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program percepatan akses keuangan daerah.

Hal ini ini didukung penelitian Desi Ariani, (2018) melakukan penelitian berjudul “Implementasi Program Keluarga Berencana di Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang menunjukkan bahwa program sudah berjalan dengan baik namun kendala yang saat ini adalah sejak ada penangkapan kepala desa pelaksana kebijakan yang tidak mampu bertanggung jawab, ditangkap oleh pihak berwajib karena kasus korupsi dana desa itu, jadi semua program terhambat. Pelaksanaan setiap program karena biaya kontribusi terhalang”. Hal ini sesuai sejalan dengan



teori Edward III (Subarsono, 2011) Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

1. Insentif, a) Tidak adanya reward/Intensifikasi kepada para staf dan masyarakat memungkinkan staf untuk tidak begitu termotivasi dalam menjalankan tugasnya, dalam penelitian hasil penelitian menunjukkan bahwa 93 responden (100%) tidak ada mendapatkan bantuan dana sehingga masyarakat juga kurang termotivasi dalam melaksanakan KB dan rapat sosialisasi Sejalan dengan peneltian Riska Susmei Rindantya (2019) Efek insentif atau upah lebih akan menimbulkan sikap menerima, acuh tak acuh dan sikap menolak dari aparatur terhadap kebijakan. Perilaku atau karakteristik dari aparatur pelaksana program KB di desa penggalangan berperan sangat penting untuk mewujudkan pelaksanaan yang hasilnya sesuai dengan target dan tujuan yang dicapai.

### **3. Komunikasi**

Pada indikator Komunikasi dalam implementasi program Keluarga Berencana di kampung KB Desa Penggalangan belum dapat dikatakan baik dalam pelaksanaannya. 1). Transmisi dan kejelasan proses penyaluran informasi kepada masyarakat sudah baik, Proses dilakukan sesuai dengan tahapan dan terarah. 2) Kejelasan informasi program Keluarga Berencana di kampung Desa

Penggalangan penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 85 responden (91 %) sudah dilayani dengan baik dan yang tidak dilayani dengan baik sebanyak 9 responden (9%).

3. Konsistensi, adanya kelabilan instruksi/perintah yang diberikan, didalam implementasi kebijakan program Keluarga Berencana sering didapati perubahan di dalam perintah dan keputusan.

Proses Komunikasi antar pelaksana kebijakan dapat berjalan dengan baik. Komunikasi didalam implementasi kebijakan program KB di desa penggalangan beberapa hal yang harus diperhatikan seperti konsistensi didapati beberap kali keterlambatan dalam penginformasian namun dalam penyaluran informasi sudah cukup baik. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 85 responden (91 %) mudah memahami informasi dan sulit memahami sebanyak 9 responden (9%). Penyaluran komunikasi yang dilakukan oleh PLKB kepada calon peserta KB maupun peserta KB cukup baik melalui iklan di media cetak maupun media elektronik, spanduk, brosur, banner dan poster, maupun promosi yang dilakukan oleh Puskesmas seperti slogan “ Ayo Ikut KB 2 Anak Cukup ” selain itu masyarakat yang ingin ber-KB bisa mendatangi puskesmas Tebing Syahbandar. Komunikasi dalam program KB sudah tertuang dalam program Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) sesuai Peraturan kepala badan kependudukan dan keluarga berencana nomor 24 tahun 2017 tentang pelayanan keluarga berencana.

Tujuan dilaksanakannya KIE adalah untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan praktek KB sehingga tercapai penambahan peserta

baru dan membina kelestarian peserta KB. Sejalan dengan pernyataan Aputra (2004) Tujuan Gerakan Keluarga Berencana (KB) adalah menurunkan tingkat kelahiran dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap masalah kependudukan menuju Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera ( NKKBS ) sebagai cara hidup yang layak dan bertanggung jawab.

#### **4. Struktur Birokrasi**

Pada indikator Struktur Birokrasi dalam implementasi program Keluarga Berencana di kampung KB Desa Penggalangan dapat dikatakan belum baik dalam pelaksanaannya. Terdapat satu sub indikator yaitu, Standar operasional pelaksana. SOP dilakukan sesuai dengan pedoman buku petunjuk teknis program kampung KB. Hal ini dikarenakan ada beberapa SOP yang belum terlaksana seperti hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 49 responden (53 %) adanya kunjungan yang rutin dilakukan dan tidak rutin sebanyak 44 responden ( 47%)Kepahaman para pelaksana terhadap SOP yang berlaku masih kurang, Tidak semua anggota sepenuhnya memahami tentang SOP yang berlaku, hanya sekedar tau.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis penyesuaian data hasil lapangan dan BPS terhitung sejak tahun 2016 sebelum menggalakkan program Kampung KB sampai tahun 2020, maka terhimpun beberapa informasi yang dapat di jadikan penilaian, berikut pemaparan hasil informasi pada tabel di bawah ini.

**Tabel 12. Analisis Data BPS kurun waktu 2016 s/d 2020**

Analisis Data BPS kurun waktu 2016 s/d 2020				
No	Aspek yang dilihat	Sebelum Program Kampung KB (2016)	Program Kampung KB (2020)	Keterangan/Informasi Tambahan
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,70 %	0,6 %	Kurun waktu 2016 s/d 2020 laju pertumbuhan dapat ditekan/turun sebesar 1,1 %
2	Angka Kelahiran Bayi Usia (0-4) Tahun	848 jiwa	720 jiwa	Angka kelahiran bayi usia (0-4) Tahun mengalami penurunan sebanyak 128 jiwa kurun waktu 2016 s/d 2020
3	Jumlah PUS	1.556	1.551	Jumlah PUS mengalami penurunan pada tahun 2020
5	Jumlah Peserta Akseptor/KB Aktif	1.975	2.697	Jumlah peserta Akseptor/KB Aktif mengalami peningkatan yakni sebesar 722 jiwa

Dari hasil analisis implementasi program Keluarga Berencana di kampung KB, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara menyeluruh implementasi program Keluarga Berencana di kampung KB Desa Penggalangan sudah berjalan dengan baik, dengan keterangan bahwa masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki sehingga implementasi program Keluarga Berencana berhasil sepenuhnya